

Strategi Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Nik Haryanti^{1*}, Soebiantoro²

^{1,2} Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 16 Kota Blitar

Korespondensi penulis: nikharyanti1983@gmail.com

Abstract

The study's overarching goal is to gain a better understanding of the community's agency empowerment communication strategy as it pertains to the building of the Ponggok Blitar district village in Pojok Prefecture. Qualitative research includes research methods such as descriptive research using case study approaches, which are based on discussions. Observations, interviews, and documentation are the methods used to gather data. All the way from collecting data to presenting it and drawing conclusions are all parts of data analysis. Findings from the study: (1) Organizing the Community Empowerment Institution's role in the Pojok Village Development Plan in the Ponggok district of Blitar through the following means: making agendas and schedules, informing the public about the plan's agenda, inviting candidates to participate, opening registration, preparing materials and equipment, and taking minutes. (2) The Public Empowerment Institution in Development's Communication Approach in Blitar's Ponggok district is participatory in nature. Public involvement in the execution of all programs can be fostered through the use of the participatory approach.

Keywords: *Communication Strategy, Village Development.*

Abstrak

Tujuan utama studi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang strategi komunikasi empowerment agen masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa distrik Ponggok Blitar di Prefektur Pojok. Penelitian kualitatif mencakup metode penelitian seperti penelitian deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus, yang didasarkan pada diskusi. Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Semua dari mengumpulkan data untuk menyajikan dan menarik kesimpulan adalah semua bagian dari analisis data. Temuan dari studi: (1) Mengorganisir peran Lembaga Kemerdekaan Komunitas dalam Rencana Pembangunan Desa Pojok di distrik Ponggok Blitar melalui cara-cara berikut: membuat agenda dan jadwal, menginformasikan publik tentang agenda rencana, mengundang kandidat untuk berpartisipasi, membuka pendaftaran, mempersiapkan bahan dan peralatan, dan mengambil laporan. (2) Lembaga Empowerment Publik dalam Komunikasi Pembangunan Pendekatan di distrik Ponggok Blitar bersifat partisipatif. Partisipasi publik dalam pelaksanaan semua program dapat didorong melalui penggunaan pendekatan partisipatif.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Pembangunan Desa

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan suatu bangsa dapat didefinisikan sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan tidak hanya kualitas hidup bagi semua anggota masyarakat, tetapi juga tingkat dan sifat perubahan positif. (Teja, 2015). Semua aspek masyarakat Indonesia, termasuk politik, ekonomi, layanan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, berkontribusi pada pembangunan negara secara keseluruhan. Untuk membawa

kemakmuran universal, untuk menyoroiti urusan nasional, dan untuk berpartisipasi dalam membangun perintah global yang didasarkan pada kebebasan, harmoni abadi, dan distribusi kekayaan yang adil.(Fartini, 2018).

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa menggunakan lembaga-lembaga masyarakat yang ada untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pemeliharaan, pembangunan, pembangunan masyarakat, dan pemberian kekuasaan. Jika komunitas desa ingin dibangun dengan sukses, maka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan harus melibatkan komunitas. Hanya anggota komunitas yang tinggal di sana yang benar-benar dapat memahami tantangan dan persyaratan pengembangan lahan mereka, dan hanya mereka yang dapat sungguh-sungguh menilai keberhasilan atau kegagalan pengembangan. (Muhtarom, 2016). Strategi komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan tertentu masyarakat sangat penting untuk pengembang.

Dengan asumsi bahwa tujuan-tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui manajemen yang tepat, sebuah strategi adalah rencana yang kohesif dan komprehensif. Satu sumber mengklaim bahwa kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani untuk "pemimpin" (Soebiantoro & Haryanti, 2022) Posisi Eksekutif Strategi perusahaan adalah jumlah upaya untuk mencapai tujuan. Selain itu, pengambilan keputusan strategis sangat penting untuk mencapai tujuan. Menurut Prabowo (2019) menyatakan bahwa strategi sebuah perusahaan adalah rumus terperinci untuk mencapai tujuannya. Dengan rencana ini, kami dapat meningkatkan keunggulan kompetitif kami dan mengurangi keterbatasan kompetisi kami.

Komunikasi sangat penting bagi keberadaan manusia. Sebagai makhluk sosial, kita bergantung padanya tidak hanya untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan hidup kita sendiri. (Devito, 2011). Di antara banyak rangsangan lingkungan, komunikasi memiliki kemampuan untuk memilih dan memilih stimulus mana yang akan digunakan, dan stimulus yang dipilih dapat memiliki dampak yang mendalam. Sejauh strategi komunikasi berjalan, ada beberapa opsi, termasuk: 1) Matlamat, 2) Tujuan, 3) Pesan, 4) Alat dan Tugas, 5) Waktu dan Bahan, 6) Penilaian dan Peningkatan.

Keseluruhan keputusan mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan disebut strategi. (Cangara, 2011) pertimbangkan keadaan dan tujuan

publik di samping Anda sendiri ketika Anda membuat strategi komunikasi. Oleh karena itu, membiasakan diri dengan penerima yang dimaksudkan adalah tahap awal. Setelah itu, semuanya turun ke komunikator yang dipilih dan kehadiran identifikasi, dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan saat ini. Beginilah cara itu dilakukan: 1) Familiaritas dengan Khalayak, 2) Kompilasi Pesan, 3) Pembentukan Metode, dan 4) Pemilihan dan Penggunaan Media.

“Pembangunan adalah upaya untuk berubah ke arah yang lebih baik yang dilakukan dengan cara yang direncanakan dan bertahap.” (Budiman, 2013) Perkembangan suatu bangsa, negara, atau pemerintahan adalah pengejaran sengaja modernitasnya melalui proses pertumbuhan dan perubahan (*nation building*) (Hariyanto, 2021). Pertumbuhan ekonomi, penciptaan pekerjaan, kerja lapangan, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan langkah-langkah pengembangan manusia lainnya adalah bagian dari persyaratan pembangunan pedesaan. (Johan, 2014).

Kemajuan menuju perbaikan di sepanjang dimensi waktu adalah tujuan pembangunan, yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus. Pemerintah belum memaksimalkan peran mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, itulah sebabnya banyak program ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Komunitas gotong royong akan dibantu dalam manajemen, perencanaan, dan pelaksanaan proyek konstruksi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga sosial yang bekerja sama dengan pemerintah desa.

Salah satu organisasi berbasis komunitas tersebut adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM), atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Ini dibentuk oleh komunitas dalam menanggapi kebutuhan mereka dan bekerja bersamaan dengan desa atau pemerintah lokal untuk memberdayakan komunitas. Kedua inisiatif publik dan masyarakat dapat didukung oleh pemerintah melalui konvensi dan kesepakatan bersama untuk membentuk lembaga-lembaga ini. Mengembangkan rencana pembangunan dengan cara partisipatif, melibatkan masyarakat Gotong-royong masyarakat, dan mengawasi implementasinya dan mengendalikan semuanya adalah tanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. (LPM) (Ruhana, 2018).

Rencana pengembangan, publik gotong-royong, implementasi, dan kontrol pengembangan semuanya merupakan tanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat

dalam proses perencanaan. (Fajar et al., 2020). Lembaga masyarakat yang telah berevolusi dari dalam, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berfungsi sebagai forum di mana anggota komunitas dapat mengungkapkan harapan dan impian mereka untuk masa depan masyarakat secara keseluruhan. Misi LPM adalah untuk “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan” dalam kerangka Republik Uni Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, dan kemerdekaan adalah tujuan utama pengembangan komunitas desa yang terintegrasi. Meskipun apa yang benar-benar penting bagi pembangunan pedesaan untuk berhasil adalah: 1) Perbaikan dalam output pertanian sebagai hasil dari peningkatan penekanan pada tenaga kerja manual; 2) Pertumbuhan dalam peluang pekerjaan yang tersedia; 3) Penguatan manufaktur berbasis lokal, skala kecil; dan 4) Autonomi yang lebih besar dan keterlibatan warga dalam pembuatan kebijakan. (Soleh, 2017).

Penulis memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi di desa Pojok berdasarkan pengamatan tidak langsung. Dia menggambarkan bagaimana peternakan masih memiliki tingkat empowerment yang rendah, yang mencegah terjadinya konstruksi seragam. Misalnya, salah satu penggalian diblokir oleh sampah, yang berarti banjir akan terjadi di daerah itu jika hujan berlangsung cukup lama.

Tidak diragukan lagi bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memainkan peran penting dalam memberdayakan desa-desa dan kota-kota untuk mencapai pembangunan yang cepat di semua bidang. Walau bagaimanapun, peranti institusi ini tidak selalu setinggi-tingginya, dan terdapat kekurangan pengetahuan umum tentang bagaimana untuk secara berkesan mengurus empowerment publik untuk pembangunan. Akibatnya, rata-rata pembangunan desa dan kota sedikit lambat. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pemuda tidak sepenuhnya terlibat dalam upaya pengembangan, dan kurangnya efisiensi Lembaga Empowerment Publik dalam melaksanakan fungsi dan kekurangan kapasitas dukungan infrastruktur juga berkontribusi untuk mengurangi kekuatan masyarakat.

Ketika sebuah perusahaan memiliki rencana yang kuat untuk komunikasi internal, itu membantu membangun mesin berminyak, dan ketika manajer dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain, perusahaan tumbuh. (Asri, 2022). Mengapa ya? Karena

mendapatkan semua orang yang terlibat, termasuk pemerintah desa dan lembaga-lembaganya, sangat penting untuk proses konstruksi yang lancar.

Dalam hal ini, lembaga yang memberdayakan masyarakat desa perlu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah desa. Pemerintah, sebagai mitra, memiliki tugas dan fungsi utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, konservasi, dan konstruksi. (Hendry Rumengan, 2023). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala desa harus bekerja sama secara efektif untuk menyusun rencana pengembangan untuk desa atau pekon. Rencana ini harus mencerminkan kebutuhan dan kemampuan desa, yang pada gilirannya harus tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2018), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi naratif terperinci dan mendalam tentang peristiwa, perilaku orang, atau situasi di lokasi tertentu.

Istilah "studi kasus" mengacu pada penyelidikan mendalam dari lingkungan sosial tertentu (dan orang-orang di dalamnya) menggunakan pengaturan atau repository data yang unik. (Haryanti, 2019). Para peneliti di distrik Pongok Blitar memilih desa Pojok sebagai studi kasus untuk mempelajari lebih lanjut tentang strategi komunikasi LPM untuk pengembangan desa.

Studi ini menggunakan trifecta metode untuk pengumpulan data dalam upaya untuk mematuhi fokus penelitian di desa Pojok Pongok distrik Blitar. observasi partisipatif (participant observation), wawancara mendalam (indept interview), dan dokumentasi (documentation) .adalah tiga metode yang selaras dengan rekomendasi yang dibuat oleh (Bogdan & Biklen, 1998).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi tiga kali: sebelum, selama, dan setelah pekerjaan lapangan. Menurut (Morissan, 2019). Dalam analisis data kualitatif, tugas dilakukan secara iteratif dan kolaboratif. Ada tiga langkah bersamaan yang dapat diambil untuk menganalisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman: 1) Kondensasi data 2) penyajian data (data displays dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/veriffication). Untuk mengecek atau memeriksa keabsahan

ditempuh beberapa teknik keabsahan data, meliputi: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Menyiapkan jadwal dan agenda, mengumumkan agenda rencana pengembangan secara publik, membuka pendaftaran atau mengundang peserta kandidat, menyiapkan peralatan, bahan, dan protokol semuanya merupakan bagian dari Perencanaan Komunikasi Lembaga Promosi Masyarakat (LPM) sehubungan dengan pengembangan distrik desa Ponggok Blitar.

Dasar pengembangan strategi komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa Tanjunganom di distrik Nganjuk Prefektur Malangsari adalah sebagai berikut:

a) Mengenal khalayak

Langkah pertama bagi setiap komunikator yang mencoba berkomunikasi secara efektif adalah mengenal audiens mereka. Pengetahuan ini harus menginformasikan pengembangan strategi mereka. Alih-alih menjadi proses pasif, komunikasi publik dinamis dan beragam, memungkinkan lebih dari sekedar interkoneksi untuk terjadi antara komunikator dan yang berkomunikasi.

b) Komunikasi publik adalah apa pun selain pasif; sebaliknya, itu dinamis dan multi-faceted, yang melibatkan lebih dari sekedar koneksi antara dua pihak yang terlibat. (Priatama, 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong orang untuk berpartisipasi dalam upaya pengembangan dengan melindungi dan meningkatkan infrastruktur yang ada.

c) Menyusun pesan

Sebagai aturan umum, pesan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus faktis dan menarik. Selain menyampaikan rasa tanggung jawab, pesan ini juga mencakup informasi tentang keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat. Selain disampaikan sebagai kewajiban, pesan tentang manfaat yang diterima oleh warga negara disampaikan oleh LPM dengan cara sedemikian rupa sehingga Anda ingin merawat

sarana yang diberikan kepada orang-orang, jadi sangat penting bahwa pesan itu akurat dan menangkap perhatian publik sejauh mungkin.

d) Menetapkan metode

Gunakan teknik reduksi atau pengulangan untuk mensosialisasikan program pembangunan komunitas dan menetapkan metode dalam strategi komunikasi LPM. Mengulangi pesan-pesan dari program pembinaan komunitas kepada orang dewasa dan remaja didasarkan pada asumsi bahwa lebih banyak orang akan memperhatikan jika mereka mendengarnya. (Shinta & Dharmawan, 2019). Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, Society Empowerment Institute bekerja sama dengan siaran, cetak, dan bahkan media TI untuk menyebarkan informasi ke populasi umum. Dengan mengurangi atau mengulangi elemen-elemen dari program membangun komunitas, LPM menetapkan metode pengulangan atau *redundancy (repetition)*. Pesan berulang kepada masyarakat dan pemuda tentang program pembinaan komunitas dimaksudkan untuk menarik minat mereka dan membuat mereka memperhatikan. Untuk mencapai audiens sarannya, Society Empowerment Institute bekerja dengan berbagai bentuk media siaran, termasuk media cetak dan digital.

Sesuai dengan (Bima & Yasin, 2021) temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa LPM, atau Yayasan Masyarakat, adalah organisasi sosial berbasis komunitas. Ini didirikan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk membantu program pengembangan di bidang-bidang seperti perencanaan, pemantauan, dan pemeliharaan. Berdasarkan Peraturan Desa, setiap desa membentuk Lembaga Empowerment Komunitas. Komunitas Desa kemudian memilih dan menetapkan manajemen Lembaga, yang kemudian disetujui atau dikonfirmasi oleh Kepala Desa. Melalui LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berusaha untuk memberdayakan potensi penuh masyarakat.

Ketika pengembangan terlibat, perencanaan sangat penting untuk penggunaan dana dan sumber daya yang lebih diarahkan, efektif dan efisien. Ini karena perencanaan berfungsi sebagai alat untuk memilih, merencanakan masa depan, dan mengalokasikan alat dan sumber daya untuk tujuan. Hasil yang diharapkan dari pengembangan tersebut harus menjawab semua masalah, memenuhi kebutuhan masyarakat, efisien, dan mencapai

tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, kemajuan dalam perencanaan adalah proses perubahan yang lebih baik yang dihasilkan oleh tindakan yang direncanakan.

Dengan membiarkan komunitas memutuskan ke mana hal-hal menuju, Anda mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan. Diana Conyers, dikutip oleh (Suparjan & Suyatno, 2013) berpendapat bahwa partisipasi publik sangat penting karena tiga alasan utama:

- a) Dengan bantuan partisipasi publik, kita dapat belajar lebih banyak tentang keinginan, kebutuhan, dan perspektif komunitas kita.
- b) Bahwa individu akan memiliki kepercayaan yang lebih besar dalam program pengembangan jika mereka terlibat dalam perencanaan dan persiapan; ini karena mereka akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kerumitan program dan rasa investasi pribadi yang lebih kuat dalam kesuksesannya.
- c) Dengan bantuan partisipasi publik, kita dapat belajar lebih banyak tentang keinginan, kebutuhan, dan perspektif komunitas kita.
- d) Bahwa individu akan memiliki kepercayaan yang lebih besar dalam program pengembangan jika mereka terlibat dalam perencanaan dan persiapan; ini karena mereka akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kerumitan program dan rasa investasi pribadi yang lebih kuat dalam kesuksesannya.

Ketika anggota masyarakat secara aktif terlibat dalam upaya kelompok, mereka lebih cenderung untuk merasakan rasa milik, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja sama menuju tujuan bersama dan mengambil kepemilikan tindakan mereka sendiri, yang di sisi lain meningkatkan kemungkinan bahwa program akan berhasil. Keterlibatan masyarakat dalam musrenbag, sebagai sarana partisipasi masyarakat, memiliki implikasi yang signifikan bagi pengembangan wilayahnya. Akibatnya, semua orang yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan proses hasil dapat mengekspresikan harapan dan kekhawatiran mereka. Peningkatan rasa kesadaran diri dan keterlibatan publik di forum musrenbag, dengan masyarakat dilihat sebagai sasaran dan sumber tujuan dan rencana pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menemukan solusi untuk masalah yang mencerminkan keinginan semua orang. Kesepakatan bersama adalah cara bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama, menunjukkan kepercayaan, keterbukaan, dan

tujuan bersama. Ini akan mengarah pada pembentukan sistem sosial yang kuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kewaspadaan nasional dan memastikan bahwa semua orang puas dengan hasil mutrenbag.

Pendekatan komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa Pojok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar

Metode partisipatif digunakan dalam implementasi Pendekatan Komunikasi Pemberdayaan Rakyat (LPM) untuk Pembangunan di distrik Pongkok Blitar. Pendekatan bawah atas untuk perencanaan pembangunan desa, juga dikenal sebagai pendekatan partisipatif, melibatkan pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan elemen sosial lainnya yang relevan bekerja sama untuk merumuskan rencana pembangunan desa. Setiap program seperti ini dapat mendapat manfaat dari keterlibatan publik, yang dapat didorong oleh pendekatan partisipatif. Kontribusi keuangan dan material desa, serta waktu dan usaha mereka, merupakan komponen penting dari setiap program pembangunan desa yang sukses, dan organisasi dan kelompok masyarakat selalu mendukung rencana tersebut.

Lembaga yang diciptakan oleh masyarakat dalam menanggapi kebutuhan mereka dan bekerja bersamaan dengan pemerintah desa dan Lurah untuk memberdayakan masyarakat disebut Lembaga Masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan No. 5 Tahun 2007 tentang Panduan untuk Pembentukan Lembaga Sosial, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kekuatan sosial dalam masyarakat harus diprioritaskan selama tahap pembentukan dan implementasi, sementara perubahan dalam masyarakat juga harus dipantau.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah desa, Kantor Jaksa Desa, dan Lembaga Masyarakat adalah tiga jenis lembaga desa yang berperan dalam pemerintahan desa. Menurut undang-undang, Pemerintah Desa dan Badan Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas pengawasan urusan pemerintah tingkat desa, juga dikenal sebagai pemerintahan desa. Tujuan pemerintahan desa adalah untuk melindungi dan memajukan kebaikan umum penduduk desa sesuai dengan tradisi lama yang telah diakui dan dipertahankan secara resmi oleh pemerintah nasional.

Kepala desa dan BPD berbagi tanggung jawab untuk memenuhi harapan dan impian masyarakat melalui fungsi pemerintah desa. Peraturan desa dan APBdes akan diatur untuk mencerminkan aspirasi masyarakat yang telah ditangani oleh kepala desa dan BPD.

4. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Desa Malangsari dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di distrik Tanjunganom Nganjuk direncanakan melalui cara-cara berikut: pembuatan agenda dan jadwal; penyebaran pengumuman publik mengenai agenda rencana; pembukaan pendaftaran atau undangan untuk kandidat; persiapan peralatan, bahan, dan protokol. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) telah mengembangkan strategi komunikasi berikut untuk pengembangan Desa Pojok di distrik Ponggok Blitar: 1) Proses komunikasi publik dinamis dan beragam, membutuhkan pengetahuan dari audiens. Ini memastikan bahwa ada lebih dari sekedar interkoneksi antara komunikator dan yang berkomunikasi. 2) Pesan tidak hanya disiapkan dan disampaikan sesuai dengan kewajiban warga, tetapi juga mencakup informasi tentang manfaat yang telah diterima warga. 3) Sosialisasi program membangun komunitas melalui pengulangan dapat membantu membangun metode dalam strategi komunikasi LPM.

Pendekatan partisipatif digunakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam strategi komunikasi mereka untuk pengembangan distrik Ponggok Blitar. Partisipasi publik dalam pelaksanaan semua program yang direncanakan dapat didorong melalui penggunaan pendekatan partisipatif. Selama memiliki dukungan dari organisasi dan kelompok masyarakat dan mencakup kontribusi desa uang, bahan, dan energi, rencana apa pun untuk program pengembangan desa adalah baik untuk pergi.

Temuan penelitian dapat digunakan oleh LPM untuk memberikan wawasan berharga tentang Strategi Komunikasi untuk Pembangunan Desa dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Bagi masyarakat, hendaknya dapat menambah wawasan pada masyarakat terkait strategi komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa.

REFERENSI

Asri, I. (2022). Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Membangun Semangat Kerja Pegawai Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Ri. *IKON Jurnal Ilmu*

Komunikasi , 27(3), 267–285.

- Bima, T., & Yasin, H. (2021). Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima. *Jurnal Pustaka Mitra*, 1(1), 24–29. <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakamitra/article/view/19>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, inc.
- Budiman, A. (2013). *Pembangunan di Indonesia Memandang dari Sisi Lain*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan INFID.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Devito, A. J. (2011). *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Kharisma Publishing Group.
- Fajar, N., Tahir, M., & Abdi. (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 640–656.
- Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Ahkam*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Haryanti, N. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi*. Bandung: Manggu.
- Hendry Rumengan. (2023). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Binalang. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.168>
- Johan, S. (2014). Peran kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 874–888.
- Morissan. (2019). *Metode Penelitian Survei*. Kencana.
- Muhtarom, A. (2016). Abid Muhtarom, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 182.
- Prabowo, R. G. M. (2019). *Manajemen Strategi*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xu37y>
- Priatama, D. (2013). Strategi Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Sosialisasi Program Pembinaan Masyarakat di Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda. *Ilmu Komunikasi*, 1(2), 70–84.
- Ruhana, F. (2018). Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 133–148. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/479>

- Shinta, Y. A., & Dharmawan, A. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Sari Kota Blitar Melalui Agrowisata Kampung Belimbing). *The Commecium*, 2(1), 66–69.
- Soebiantoro, & Haryanti, N. (2022). *Perilaku Organisasi*. Purbalingga: Eurika Media Aksara.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparjan, & Suyatno, H. (2013). *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk Kesejahteraan masyarakat di Kawasan Pesisir. *Jurnal Aspirasi*, 6(6), 63–76.
- Undang-undang Nomer 6 tahun 2014. 2014. *Undang-undang Desa 2014*. Republik Indonesia